



DALAM TANGANI COVID-19

Realokasi Anggaran Jangan Ada Duplikasi

YOGYA (KR) - Pemerintah, baik pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota, melakukan realokasi anggaran dan berupaya memberikan jaring pengaman sosial kepada warga miskin dan para pekerja yang terdampak Covid-19. Pemda DIY terus berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar tidak terjadi duplikasi data peruntukan dan penerima bantuan.

Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, bantuan sosial tersebut sudah disiapkan dari realokasi APBD DIY. Namun untuk mencairkannya menunggu kepastian data penerima bantuan dari Pemerintah Pusat untuk program-program dari realokasi APBN seperti Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan dan lainnya.

"Sudah dialokasikan, tapi kami belum berani keluarkan kalau pusat belum keluar data validnya, takut kalau dobel. Jangan sampai Jakarta memberi, kita juga memberi, sementara masih banyak yang juga berhak tapi belum menerima," kata Sultan usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD DIY, Selasa (14/4).

Sultan mengatakan pihaknya juga terus berembuk dengan Pemkab/Pemkot terkait peruntukan bantuan dan

program, sehingga tidak terjadi duplikasi. Sultan juga telah menginstruksikan Pemkab/Pemkot mencermati peruntukan bagi desa. Sebab, selain APBDes, APBN utk desa juga bisa direalokasi untuk membiayai bantuan warga terdampak Covid-19.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY Bambang Wisnu Handoyo yang akrab disapa BWH ini mengungkapkan pihaknya melakukan redesain APBD DIY 2020 sebesar Rp 246 miliar. Hal ini karena membutuhkan dana yang belum dianggarkan dalam situasi Tanggap Darurat Covid-19 di DIY dan Bencana Nasional Covid-19. BWH menjelaskan setelah APBD 2020 diredesain maka kebutuhan anggaran sebesar Rp 246 miliar ini untuk menangani wabah virus Korona di DIY. Dana penanganan Covid-19 ini difokuskan

untuk kesehatan, jaring pengaman sosial dan ekonomi. Artinya Pemda DIY membutuhkan anggaran redesain APBD tersebut dimanfaatkan untuk penanganan kasus virus Korona yang difokuskan pada tiga bidang tersebut.

"Tahap pertama yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 ini sebesar Rp 246 miliar. Anggaran ini diperuntukkan bagi orang-orang yang terdampak maupun upaya penanganan virus Korona yang difokuskan pada tiga bidang itu. Jadi dalam waktu sesingkat-singkatnya, redesain APBD 2020 di kabupaten/kota maupun APBDes se-DIY bisa diselesaikan Kamis (16/4) ini agar kita bisa memastikan rencana kebutuhan penanganan Covid-19 di DIY," ungkapnya.

Pihaknya telah mengumpulkan seluruh Sekda kabupaten/kota se-DIY yang telah bersepakat untuk melakukan finalisasi rencana kebutuhan anggaran penanganan Covid-19 pekan ini, sehingga pencairan bisa dilakukan pekan depan atau minggu ketiga April 2020. Namun pemanfaatan anggaran tersebut yang penting difokuskan pada kebutuhan tiga bidang di atas.

(Bro/Ira/Ria)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005